

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
(Studi Pada Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



OLEH:

EDELTRUDIS LURUK NAHAK

NIM: 2018210203

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2022

RINGKASAN

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu petunjuk yang akan dicapai dalam upaya meringankan beban kemiskinan. Program perwalian keluarga adalah ide yang dibuat oleh otoritas publik dalam pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, pengaturan dan aset pemerintah diharapkan dapat membantu investasi waktu dan energi yang signifikan untuk menjamin kepuasan kebebasan dan bantuan pemerintah. Selain itu, motivasi di balik eksplorasi ini adalah untuk mengetahui cara yang paling umum untuk melaksanakan program kelompok kepercayaan dalam upaya pengentasan kemiskinan di samping variabel pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan metode subjektif, dengan berbagai informasi, memanfaatkan persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Prosedur pengujian yang digunakan adalah pengujian purposive. Pemeriksaan informasi menggunakan teknik pengumpulan informasi, Information Reduce (Penurunan Informasi), Information Show (Information Show), End Drawing (Penarikan Ujung). Hasil pemeriksaan pelaksanaan Program Amanah Keluarga (PKH) di Kota Sidomulyo sudah selesai sesuai sistem yang ada. Siklus korespondensi dalam pelaksanaan program kelompok amanah besar dengan kewajiban, memberikan inspirasi kepada individu yang mendapatkan bantuan dari kelompok amanah program. Dalam pelaksanaan program kelompok amanah di kota Sidomulyo terkait dengan aset-aset yang telah diselesaikan, sangat bagus dalam menghimpun tujuan dan asumsi yang diinginkan bersama. Komponen pendorong dalam pelaksanaan program kelompok amanah (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan harus terlihat dari kewajiban sekutu kepada anggota kelompok amanah untuk terus mendesak mereka untuk lebih sadar akan pentingnya inovasi. dan kehidupan yang lebih adil. Unsur penghambat dalam pelaksanaan program kelompok amanah (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada umumnya akan muncul karena tidak adanya reaksi dari para atasan terhadap isu-isu yang dipandang oleh program kelompok amanah.

Kata kunci: Implementasi, PKH, Kemiskinan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah yang membingungkan yang dilihat oleh semua badan legislatif di planet ini. Kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Elemen-elemen ini mencakup tingkat gaji, pelatihan, kesejahteraan, penerimaan tenaga kerja dan produk, wilayah geografis, orientasi, dan keadaan alam. Neediness adalah suatu kondisi dimana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan esensialnya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih megah. Oleh karena itu, kebutuhan harus dipertahankan, karena seandainya tidak bertahan, pembangunan publik yang mengganggu akan mampu.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh otoritas publik sedemikian rupa untuk membuka pintu bagi orang miskin untuk mengurangi kebutuhan. Kemiskinan terjadi karena banyaknya jumlah individu dalam satu keluarga, ekonomi yang tidak bagus, peluang kerja yang masih terbuka lebar dalam hal hal, pendidikan yang rendah, dan kurangnya kemampuan. Salah satu upaya tersebut adalah melalui pendekatan penguatan keluarga yang mengacu pada Peraturan Nomor 10 Tahun 1992 tentang Peningkatan Kependudukan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera yang pelaksanaannya diatur dalam Petunjuk Resmi (INPRES) Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pemajuan Keluarga Sejahtera dalam rangka untuk memperluas penurunan kemiskinan.

Masalah kebutuhan adalah masalah yang membingungkan dan kompleks. Oleh karena itu, upaya pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup berbagai bagian kehidupan individu, dan dilakukan secara terkoordinasi. Dalam upaya mengurangi kebutuhan ada dua teknik dasar yang harus diambil oleh otoritas publik. Pertama-tama, melindungi keluarga dan pertemuan yang tidak beruntung dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kedua, melibatkan mereka untuk dapat melanjutkan pekerjaan dan mencegah kemelaratan baru.

Dalam membatasi masalah bantuan sosial pemerintah, khususnya yang membutuhkan, pemerintah Indonesia memiliki program penanggulangan yang berbeda, salah satunya adalah program bantuan sosial dari otoritas publik, khususnya Program Kepercayaan Keluarga (PKH). Program ini merupakan penyempurnaan dari kerangka jaminan sosial yang dapat meringankan dan membantu keluarga yang sangat tidak mampu dalam mengakses administrasi kesejahteraan dan pelatihan penting dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatarbelakangi oleh isu-isu pokok kemajuan, khususnya banyaknya jumlah penduduk miskin dan buruknya kualitas SDM.

Sesuai Pedoman Pendeta Perhimpunan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Amanah Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKH, adalah program pemberian bantuan sosial secara kontingen kepada keluarga miskin dan tidak mampu serta orang yang tidak mampu. Tercantum dalam informasi terkoordinasi dari program perawatan malang,

ditangani oleh data bantuan menengah dan pemerintah. juga, ditugaskan sebagai kelompok penerima PKH. Sebelum Program Amanah Keluarga (PKH), beberapa jaringan kota tidak memiliki pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, karena sebagian besar pekerjaan daerah hanya sebagai peternak, terlepas dari pengadaan di bawah normal (PERMENSOS No. 1 Tahun 2018).

Desa Sidomulyo sebelumnya merupakan perpaduan dari dua kota, tepatnya kota Purorejo dengan kepala kota bernama M. Singorejo dan kota Tinjumoyo dengan kepala kota bernama Ramani, akhirnya pada tahun 1947 kedua kota tersebut sepakat untuk menyatu menjadi satu kota yang disebut Kota Sidomulyo. Kota Sidomulyo merupakan salah satu kota yang mendapat bantuan dari program kelompok amanah.

Di Desa Sidomulyo, bantuan Program Kepercayaan Keluarga (PKH) diberikan kepada keluarga sangat tidak mampu dengan syarat memiliki anak kecil, dan anak kecil, ibu-ibu yang sedang hamil. Program Amanah Keluarga (PKH) lebih banyak merupakan pergantian peristiwa dan penguatan keluarga kurang mampu sebagai rekan sosial dengan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk memberdayakan program ini agar lestari dan siap mengubah keluarga kurang mampu menjadi keluarga sejahtera.

Terdapat 3 villa di desa Sidomulyo yaitu desa Tinjumoyo, desa Tonggolari, dan desa Sukorembung, diantara ketiga desa tersebut villa terbesar adalah desa Tinjumoyo. Dari ketiga vila tersebut, setiap desa memiliki 45 keluarga yang mendapatkan Program Family Trust yang merupakan delegasi keluarga

kurang mampu. Bantuan untuk program kelompok amanah ini berupa uang dan diperoleh 4 kali setiap tahun dan jumlahnya tidak sama untuk setiap penerima manfaat.

Tabel 1.1. Nominal Penerima PKH

| No | Sasaran Penerima | Nominal |
|----|-----------------------------------|-------------|
| 1. | Ibu Hamil | Rp. 700.000 |
| 2. | Balita | Rp. 750.000 |
| 3. | Sekolah Dasar | Rp. 250.000 |
| 4. | Sekolah Menengah Pertama | Rp. 350.000 |
| 5. | Sekolah Menengah Atas | Rp. 500.000 |
| 6. | Lansia | Rp. 600.000 |
| 7. | Disabilitas (berkebutuhan khusus) | Rp. 700.000 |

Misi luar biasa PKH dalam mengurangi kebutuhan jelas semakin jelas mengingat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2017 terjadi penurunan kebutuhan dari 10,64% pada Walk 2017 menjadi 10,12% pada September 2017 total penduduk atau 27.771.220 penduduk di Musim Semi menjadi 26.582.990 orang pada tahun September dengan pengurangan total 1.188.230 orang miskin atau pengurangan jumlah orang miskin sebesar 0,58%, (BPS, 2017).

Banyak wali yang mengeluh tentang kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang sangat mahal, yang membuat banyak anak tidak dapat melanjutkan sekolah mereka ke tingkat yang lebih tinggi dan tidak dapat mencari terapi ketika mereka lemah. Setelah adanya bantuan Program Amanah Keluarga (PKH) masyarakat kota merasa agak terbantu, seperti mengumpulkan biaya kebutuhan sekolah dan memperbesar biaya mencari kebutuhan pokok.

Bantuan Family Trust Program harus dapat diakses sehingga keluarga yang sangat tidak mampu dapat menjalankan atau menjalankan aset dari otoritas publik sesuai dengan strategi yang telah dijalankan, seperti menyekolahkan anak-anak

mereka dan berfokus pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sekutu Program Kepercayaan Keluarga (PKH) untuk memberikan bimbingan kepada keluarga yang sangat tidak mampu terkait dengan pelatihan dan kesejahteraan. Program Amanah Keluarga (PKH) dapat menangani kemelaratan yang menjadi perhatian utama dan telah dilaksanakan cukup lama. Berbagai teknik, pendekatan, proyek dan latihan untuk mengurangi kemiskinan baik secara langsung maupun secara implisit telah dilakukan, namun masih banyak masyarakat kurang mampu di kota ini yang belum mendapatkan bantuan dari Program Bantuan Keluarga (PKH).

Penanggulangan kemelaratan tentu bukan sesuatu yang sederhana untuk bertahan hidup, mengingat kemelaratan merupakan persoalan yang multi-aspek, lebih spesifiknya suatu keadaan yang dialami oleh suatu negara di mana terdapat berbagai perjuangan, baik besar maupun kecil di bidang politik, sosial, finansial dan moral. bidang. Anggota Program Kepercayaan Keluarga (PKH) adalah individu yang kurang mampu yang kehidupannya kurang optimal. Dengan program ini, diharapkan program ini dapat mengarahkan orang-orang yang kurang mampu yang instruksinya tidak berdaya dan pedoman kesejahteraannya tidak diperhatikan. Program Kepercayaan Keluarga (PKH) yang dilaksanakan dan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin tergantung pada kekuatan daerah, khususnya untuk mensukseskan masyarakat miskin.

1.2. rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka ada beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi program keluarga harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan?
2. Apa faktor penghambat implementasi program keluarga harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan?

1.3. tujuan penelitian

1. Mengetahui proses implementasi program keluarga harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
2. Mengetahui faktor yang menghambat implementasi program keluarga harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

1.4. manfaat penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada ilmu pemerintah, khususnya pada implementasi pemerintah desa terhadap program keluarga harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk pihak yang terkait dengan implementasi pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwidjaya, Ignatius dan Suprojo, Agung. 2021. Pelayanan Di Dinas Sosial Kota Batu Dalam Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Bagi Keluarga Miskin (PKH).
- Kholif, Isnaini Khodziah, dkk. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarnlandong Kabupaten Mojokerto.
- Moleong, 2014. Metode Penelitian Kualitatif: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Setyawan, Dody. 2017. Pengantar Kebijakan Publik. Malang: Inteligencia Media.
- Kementrian Sosial 2012. Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH). Jakarta.